

Judul Studi:
**PENGEMBANGAN SUMBER DANA ALTERNATIF
UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN**

Nama Unit Pelaksana:
Direktorat Neraca Pembayaran dan Kerjasama Ekonomi Internasional
E-mail: lukita@bappenas.go.id

ABSTRAK

Tujuan dari studi ini akan mengkaji sumber-sumber dana utama untuk pembiayaan pembangunan yang masing-masing adalah sumberdana domestik, investasi asing, perdagangan internasional dan utang luar negeri. Selanjutnya akan diuraikan beberapa sumberdana alternatif non-konvensional yang dapat dieksplorasi seperti global public goods, pembiayaan pembangunan berbasis aset, sistem pajak global, arsitektur baru keuangan internasional dan bank pembangunan domestik. Analisa yang dilakukan dalam kajian ini meliputi ruang lingkup pertama sumber dana domestik untuk pembiayaan pembangunan, kedua investasi asing untuk pembiayaan pembangunan, ketiga perdagangan internasional sebagai motor pembangunan, keempat utang dan bantuan luar negeri, dan kelima sumber dana alternatif non-konvensional untuk pembiayaan pembangunan.

Beberapa hal yang diketahui dari studi mengenai pengembangan sumber dana alternatif untuk pembiayaan pembangunan ini adalah bahwa terdapat empat sumber konvensional utama untuk pembiayaan pembangunan. Adapun kajian mengenai sumber-sumber domestik untuk pembiayaan pembangunan menunjukkan bahwa ketersediaan dan mobilisasi sumber-sumber dana domestik, merupakan prasyarat bagi pembentukan modal riil dan, pada gilirannya, pembangunan nasional. Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika sumber-sumber dimobilisasi dan ditransformasikan secara efisien menjadi kegiatan produktif. Penciptaan sumber-sumber domestik untuk menabung dan menanamkan modal secara produktif merupakan landasan utama pembangunan yang berkelanjutan. Setidaknya terdapat lima konsep sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yang dibahas dalam kajian ini yaitu: Global Public Goods, Pembangunan Berbasis Aset, Sistem Pajak Global, Arsitektur Baru Keuangan Internasional dan Bank Pembangunan Domestik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep alternatif inovasi sumber daya untuk pembiayaan pembangunan cukup mungkin diterapkan di Indonesia namun memiliki tingkat kesulitan yang berbeda karena dikelilingi beberapa faktor permasalahan domestik maupun internasional yang tak bisa dilepaskan. Begitu juga aspek-aspek non ekonomis yang melingkupinya termasuk aspek politik internasional.

Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 dan telah dijabarkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 serta Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) 2001 dan Repeta 2002, dinyatakan bahwa pinjaman luar negeri secara bertahap harus dikurangi.

Sementara itu, alasan-alasan ekonomis yang melandasi kenapa pengurangan utang luar negeri ini harus dilakukan antara lain: (a). Beban yang harus diangsur makin lama akan makin meningkat yang bisa dikarenakan adanya tekanan nilai tukar mata uang maupun karena adanya tambahan utang-utang baru; (b). Kemampuan untuk membayarnya makin lama akan semakin menurun bila nilai *Debt Service Ratio* (DSR) meningkat. Besarnya kemampuan untuk membayar ini ditentukan oleh seberapa cepat dan seberapa besar kemampuan ekspor dapat ditingkatkan serta kemauan baik pemerintah maupun swasta untuk menurunkan atau paling tidak memperlambat akumulasi utang luar negeri; (c). Adanya kewajiban perekonomian untuk membayar yang besar karena adanya utang luar negeri pada gilirannya potensi yang tersisa untuk mendorong perekonomian dalam negeri menjadi makin kecil; (d). Secara teoritis jumlah utang luar negeri yang besar dapat mempengaruhi ekspektasi masyarakat melalui penilaian terhadap prospek ekonomi. Penilaian ini dikenal dengan situasi *debt over-hang effect*, artinya situasi dimana pembayaran yang harus dilakukan terhadap utang luar negeri akan menyerap seluruh sumber daya pembangunan yang pada akhirnya akan mendorong krisis ekonomi.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia sampai dengan bulan Agustus 2001, tercatat bahwa utang luar negeri Indonesia berjumlah \$US 137,6 miliar, yang terdiri dari utang pemerintah sebesar 53,9% dan utang luar negeri swasta sebesar 46,1%. Sementara itu, berkaitan dengan upaya pengurangan pinjaman ini, pemerintah sejak tahun 1999/2000 telah mengurangi aliran masuk pinjaman luar negeri bersih. Pada tahun 1999/2000 pinjaman luar negeri bersih adalah Rp. 29,4 triliun, menjadi Rp. 19,9 triliun pada tahun 2001 dan diproyeksikan Rp 18,6 triliun pada RAPBN 2002. Selanjutnya secara bertahap aliran masuk pinjaman luar negeri bersih (nilai penyerapan pinjaman dikurangi pembayaran pokok tanpa adanya penjadwalan utang) diupayakan menjadi negatif pada tahun 2003 seperti tertuang dalam Repeta 2002; dan selanjutnya dengan demikian secara absolut nilai utang luar negeri pemerintah akan terus berkurang.

Sejalan dengan upaya pengurangan utang luar negeri ini, tentunya upaya-upaya pencarian dana alternatif kreatif dan murah bagi pembangunan baik dari sumber dalam negeri maupun dalam negeri harus dilakukan. Bila upaya pencarian ini tidak dilakukan, tentunya akan berakibat berkurangnya sisi penerimaan dari APBN yang pada akhirnya tidak akan tercapainya kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*); dan juga hal ini akan mengurangi sumber dana bagi sektor swasta untuk melakukan kegiatannya. Di sisi pengeluaran, upaya untuk meningkatkan dana pembangunan dapat ditingkatkan melalui upaya pengurangan beban pembayaran utang, misalnya mekanisme *debt swap*.

Salah satu cara untuk menggali potensi dalam negeri sebagai dana alternatif adalah berupaya meningkatkan penerimaan pajak. Tetapi, dikarenakan keadaan perekonomian dalam negeri yang belum pulih sejak krisis ekonomi yang dimulai pertengahan 1997, dan juga masih terbatasnya kemampuan pemerintah untuk memobilisasi pajak, maka upaya meningkatkan penerimaan pajak yang terlalu besar pada

saat ini dikhawatirkan akan berakibat negatif terhadap dunia usaha dan juga perekonomian nasional.

Sementara itu, berkaitan dengan desentralisasi, peranan daerah dalam upaya peningkatan sumber dana pembangunan akan menjadi semakin penting. Sehingga fokus upaya pencarian dana alternatif untuk pembiayaan pembangunan ini tidak hanya dilakukan untuk kepentingan pemerintahan pusat saja tetapi juga mengikursertakan pemerintahan daerah. Tentunya dengan asumsi upaya pencarian dana ini dilakukan dengan tanpa akan menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan investasi dan produksi di daerah.

Sehingga berdasarkan kondisi-kondisi di atas, maka perlu dilakukan kajian dalam upaya mencari alternatif-alternatif lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri (diluar peningkatan pajak), untuk memobilisasikan pembiayaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kebijakan deregulasi dan liberalisasi melalui penurunan tarif dan privatisasi (sebagai contoh) telah menurunkan kemampuan sektor publik untuk memobilisasi sumberdana untuk pembiayaan pembangunan dari sumber-sumber tradisional, sementara pajak tak mampu dikenakan pada sektor-sektor baru dari efek globalisasi seperti perdagangan melalui internet.

Di lain pihak, selama beberapa dekade ini di pasar keuangan swasta telah terjadi inovasi secara berkala dalam memobilisasi sumberdaya keuangan untuk pembangunan. Inovasi di pasar keuangan swasta ini telah meluas dari fasilitas kredit skala kecil yang terus berkembang dengan pengenalan pasar dan instrumen keuangan yang lebih rumit dan maju. Mengacu pada kemajuan berupa inovasi-inovasi di pasar keuangan swasta ini, sudah semestinya jika hal tersebut dapat diikuti pula oleh sektor publik.

Pada hakekatnya, pencarian alternatif-alternatif baru pembiayaan pembangunan di samping sumber-sumber pembiayaan konvensional memang perlu terus diupayakan. Hal ini juga sejalan dengan upaya untuk menurunkan tingkat utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Tujuan

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan sumber dana alternatif untuk pembiayaan pembangunan. Pembahasan hasil studi ini selanjutnya akan dituliskan dengan urutan sebagai berikut: Pertama sumber dana keuangan domestik untuk pembangunan, kedua adalah investasi swasta terutama penanaman modal asing sebagai sumber dana pembiayaan pembangunan, ketiga adalah perdagangan internasional sebagai motor pembangunan, keempat adalah utang dan bantuan luar negeri, kelima adalah sumber dana alternatif non konvensional untuk pembiayaan pembangunan, dan terakhir adalah kesimpulan dan saran kebijakan.

Hasil Studi

A. Sumber Dana Domestik untuk Pembiayaan Pembangunan

Ketersediaan dan mobilisasi sumber-sumber dana, terutama domestik, merupakan prasyarat bagi pembentukan modal riil dan, pada gilirannya, pembangunan nasional. Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika sumber-sumber dimobilisasi dan ditransformasikan secara efisien menjadi kegiatan produktif. Oleh karena itu, pengembangan sistem keuangan yang efisien dalam menciptakan hubungan yang utama antara tabungan dan investasi menjadi penting. Tidak saja diperlukan koordinasi di antara badan-badan yang berbeda internal dan intra tingkat pemerintah, tetapi juga koordinasi antara sektor pemerintah dan swasta, serta antara berbagai komponen sektor swasta.

Penciptaan sumber-sumber domestik untuk menabung dan menanamkan modal secara produktif merupakan landasan utama pembangunan yang berkelanjutan. Berapapun besarnya tingkat tabungan domestik, yang terpenting adalah jaminan terhadap pengalokasian tabungan tersebut secara efisien dan dibutuhkan dalam arti sosial, politik dan pembangunan. Di samping itu, tingkat tabungan domestik yang sangat rendah juga merupakan salah satu kelemahan struktural utama yang perlu dipecahkan di sebagian besar negara berkembang; namun demikian, tabungan domestik tidak akan mencukupi atau investasi nasional tidak akan berkualitas tinggi tanpa adanya disiplin ekonomi makro.

Tantangan utama dari penggalan sumber dana domestik ini adalah bagaimana meningkatkan upaya menggali pendapatan dari dana sumber-sumber domestik dan bagaimana secara efektif dapat disalurkan untuk pembangunan sekaligus peningkatan kapasitas produksi nasional. Dalam kerangka tersebut, diperlukan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya tabungan swasta, konsolidasi keuangan negara, dan adanya ruang bagi inisiatif swasta. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa dibutuhkan kebijakan makro ekonomi yang kondusif untuk mendukung terciptanya sumber dana domestik dan pengalokasiannya secara efektif.

Hal kedua adalah upaya untuk penguatan sektor keuangan negara. Mobilisasi pendapatan pemerintah tanpa mengganggu atau mengurangi inisiatif swasta merupakan kunci utama pencapaian pertumbuhan. Dalam hal ini, disiplin fiskal merupakan prasyarat pada keseluruhan rentang waktu untuk mempertahankan pembiayaan defisit tetap rendah guna menghindari inflasi, menghindari akumulasi utang pemerintah yang berlebihan serta menjamin agar pinjaman pemerintah tidak menyedot sumber-sumber dana bagi sektor swasta dari pasar kredit domestik.

Hal ketiga yang perlu diperlukan dalam penggalan sumber-sumber dana domestik untuk pembiayaan pembangunan adalah penguatan sektor keuangan domestik. Tujuan utama sektor keuangan adalah menggalakan tabungan dan menyalurkannya ke sektor-sektor produktif. Penguatan dan pengembangan sektor keuangan domestik dilakukan dengan mendorong berkembangnya pasar uang dan pasar modal yang baik melalui sistem perbankan yang sehat dan pengaturan kelembagaan lain yang ditujukan kepada kebutuhan pembiayaan pembangunan, termasuk non-perbankan, yang mendorong dan menyalurkan tabungan serta membantu perkembangan investasi produktif.

B. Investasi Asing untuk Pembiayaan Pembangunan

Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai salah satu komponen aliran modal yang masuk ke suatu negara dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai resiko yang kecil dibandingkan aliran modal lainnya, misalnya portofolio investasi ataupun utang luar negeri. Salah satu sebabnya adalah dikarenakan PMA tidak begitu mudah terkena gejolak fluktuasi mata uang (seperti halnya investasi portofolio) ataupun beban bunga yang berat (misalnya utang luar negeri). Salah satu contoh adalah krisis ekonomi yang terjadi di Asia pada tahun 1997. PMA yang dianggap sebagai salah satu pemicu terjadinya krisis ekonomi di Asia, melainkan faktor pemicunya adalah investasi portofolio. Selain itu kita bisa melihat begitu beratnya beban pembayaran bunga yang diderita masyarakat Indonesia akibat utang luar negeri.

Sehingga pada masa mendatang sudah dapat dipastikan bahwa PMA diharapkan akan menjadi kunci suksesnya pembangunan di Indonesia. Pembangunan yang diharapkan bagi negara kita pada masa mendatang adalah pembangunan berkelanjutan. Sehingga PMA yang harus diterapkan di negara kita adalah PMA yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan. Yang dimaksud dengan PMA yang berkelanjutan di sini adalah PMA yang dapat memaksimalkan keuntungan PMA bagi Indonesia (misalnya kesempatan kerja; kenaikan pendapatan; transfer teknologi; stabilitas ekonomi); dan meminimalkan dampak negatif PMA bagi Indonesia (misalnya monopoli oleh perusahaan multinasional; dampak negatif terhadap sosial dan ekonomi; dan degradasi terhadap lingkungan).

Dampak dari PMA terhadap perekonomian suatu negara dapat disimpulkan bahwa dampak terhadap ekonomi secara keseluruhan sangat tergantung dari kondisi host countries; tingkat tabungan-investasi domestik; metode yang digunakan dalam PMA (misalnya merger & acquisition ataupun greenfield investment); sektor-sektor yang terlibat dalam PMA; dan tentunya stabilitas dari host countries. Pada akhirnya diharapkan perlu untuk melakukan penilaian terhadap faktor faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh PMA. Keputusan perusahaan asing dalam melakukan PMA akan didasarkan pada berbagai pertimbangan, misalnya stabilitas politik di host countries, aksesibilitas dan potensial pasar di host countries, repatriasi keuntungan untuk kepentingan investor asing, dan terdapatnya infrastruktur yang memadai di host countries. Privatisasi dan deregulasi merupakan faktor kunci untuk menarik PMA.

C. Perdagangan Internasional Sebagai Motor Pembangunan

Perdagangan internasional sendiri diharapkan dapat menjadi mesin dari pertumbuhan ekonomi. Masalah perdagangan internasional, yang berlandaskan atas kebijaksanaan pembangunan ekonomi maupun kebijaksanaan perdagangan luar negeri banyak menyangkut ekspor sebagai pembatas pertumbuhan ekonomi. Potensi ekspor Indonesia sendiri dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dunia dan tantangan pada daya saing nasional.

Dengan perkembangan ekonomi dunia yang diliputi gejolak dan perubahan struktural telah menyebabkan ketidakpastian dan makin ketatnya ekonomi dunia sebagai

pasar ekspor Indonesia. Menghadapi perkembangan di atas, Indonesia perlu berupaya meningkatkan peran di berbagai forum internasional baik yang bersifat multilateral dan regional yang menunjang usaha untuk menciptakan tatanan perdagangan dunia yang lebih bebas, terbuka dan adil.

Guna mengembangkan perdagangan internasional, setidaknya diperlukan dua hal yaitu penciptaan persaingan sehat di dalam negeri untuk meningkatkan daya saing serta peningkatan akses pasar perdagangan internasional. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengatasi masalah yang timbul dari fluktuasi harga dan tekanan (shock) yang timbul dari luar.

Dalam upaya memenangkan persaingan di pasar internasional, diperlukan tingkat daya saing yang tinggi. Tingkat daya saing Indonesia di pasar internasional dinilai masih cukup rendah dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Pada tahun 2001, index daya saing Indonesia berada pada urutan ke 55, satu tingkat di bawah negara tetangga yaitu Philipina. Hal ini sangat jauh sekali dibandingkan Singapura yang berada pada urutan ke 10. Sedangkan negara lain seperti Malaysia, China, Taiwan atau India memiliki ranking indeks daya saing berada di atas Indonesia.

Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing di pasar global adalah dengan penciptaan kompetisi di dalam negeri. Kompetisi domestik atau persaingan usaha yang sehat merupakan suatu bagian dari prinsip ekonomi pasar yang merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam rangka penciptaan ekonomi pasar yang kuat.

Kompetisi yang sehat dalam perdagangan domestik sendiri baru mendapatkan perhatian secara serius di tahun 1999. Sejak tahun 1999, Indonesia memiliki undang-undang persaingan usaha yaitu UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang disahkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR pada tanggal 5 Maret 1999. UU ini berlaku efektif satu tahun sejak diundangkan disertai masa persiapan enam bulan.

Pada akhirnya, semangat persaingan usaha yang sehat dalam mekaniseme pasar hanya dapat tercapai bila semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta serta lembaga non pemerintah lain (LSM) dapat memiliki kesamaan pandang dan tindakan untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Tanpa konsensus dari semua pihak, akan sulit bagi pemerintah sendiri mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

Kebijakan perdagangan luar negeri sendiri, merupakan salah satu dari kebijakan ekonomi makro, adalah tindakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi struktur dan arah transaksi perdagangan dan pembayaran internasional. Karena merupakan salah satu bagian, maka kebijakan perdagangan luar negeri tidak independen, melainkan saling mempengaruhi terhadap komponen-komponen lain dari kebijakan ekonomi makro tersebut, seperti kebijakan industri, kebijakan fiskal, kebijakan tenaga kerja, kebijakan moneter dan lainnya. Tujuan kebijakan ekonomi perdagangan luar negeri adalah pertama, untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk atau negatif dari luar negeri, misalnya efek resesi ekonomi dunia terhadap pertumbuhan ekspor Indonesia. Kedua, untuk melindungi industri nasional dari persaingan barang-barang impor dari luar negeri. Ketiga, untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran yang sekaligus menjamin persediaan devisa yang cukup terutama untuk kebutuhan pembayaran impor dan cicilan utang luar negeri.

Strategi pengembangan ekspor pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan struktur ekspor yang kuat dan tangguh. Struktur ekspor yang tangguh dapat tercapai bilamana produk ekspor tersebut telah benar-benar beragam jenisnya, pasarnya tersebar luas, dan pelakunya juga makin banyak. Untuk itu langkah yang diperlukan adalah diversifikasi, baik produk, pasar, maupun pelakunya.

Perlu juga disadari bahwa, memasarkan produk di luar negeri sering berbeda dengan memasarkannya di dalam negeri. Pasaran di luar negeri sangat kompetitif sehingga hanya pengusaha yang ulet dan mempunyai daya saing tinggi yang akan menang dalam persaingan tersebut dan yang merebut pasaran.

Mengingat setiap negara selalu berpacu melakukan usaha untuk meningkatkan daya saingnya, maka daya saing suatu produk bersifat dinamis atau berkembang. Oleh karena itu, dapat saja suatu produk pada saat tertentu mempunyai daya saing yang kuat sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimiliki pada waktu itu, tetapi pada saat lain akan berubah, tidak lagi memiliki keunggulan komparatif. Dengan demikian, keunggulan komparatif yang kita miliki harus selalu dijaga dan dipertahankan agar tidak menurun dibandingkan dengan keunggulan yang dimiliki oleh negara pesaing.

D. Utang dan Bantuan Luar Negeri

Sumber keempat dari sumber dana pembiayaan pembangunan yaitu utang dan bantuan luar negeri. Sesuai amanat dari GBHN bahwa tingkat utang luar negeri perlu dikurangi, pembahasan ini lebih memfokuskan pada analisis terhadap utang luar negeri berikut permasalahan dan agenda ke depannya.

Jika dilakukan perbandingan negara-negara berkembang Asia lainnya dan beberapa negara Amerika Latin tahun 1987-2000, pada dasarnya Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang menghadapi masalah luar negeri. Dalam hal stok terhadap PDB pada tahun 2000, Indonesia tergolong paling besar namun dalam hal beban pembayaran terhadap ekspor barang dan jasa, Indonesia tidaklah sebesar Argentina dan Brazil. Bahkan stok utang luar negeri Indonesia sudah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Negara yang menghadapi masalah pembayaran luar negerinya cenderung mengalami gangguan ketidakseimbangan eksternal (external imbalances). Masalah akibat ketidakseimbangan eksternal tidak hanya dihadapi oleh Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya negara yang menjadi pasien IMF sehingga perlu mendapatkan kucuran dana dari lembaga keuangan internasional tersebut.

Permasalahan utang luar negeri sekarang telah menjadi fokus perhatian utama meski pada awalnya sendiri utang luar negeri seperti dimanakan oleh GBHN tahun 1973 hanya sebagai pelengkap dan pembantu akan tetapi dalam perjalanannya telah terjadi penumpukan stok utang luar negeri yang relatif tinggi. Posisi utang yang sudah tinggi tersebut membawa konsekwensi logis pada beban pembayarannya.

Melemahnya nilai tukar rupiah juga menyebabkan kewajiban pembayaran utang dalam rupiah menjadi meningkat secara tajam, sementara ketersediaan dana luar negeri semakin sulit. Bagi sektor swasta, melemahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan sektor ini harus menyediakan rupiah lebih besar untuk pembelian valas dalam rangka

pembayaran kembali utang luar negerinya. Beban pembayaran menjadi semakin berat karena keperluan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo telah meningkatkan permintaan terhadap mata uang dolar Amerika yang otomatis semakin menekan nilai tukar rupiah.

Selain masalah pembayaran kembali, dengan utang yang besar juga harus disadari kerentanannya terhadap segala gejolak dari luar seperti halnya pada waktu terjadi naiknya bunga internasional (pada awal tahun 1980an), turunnya harga komoditi andalan ekspor dan seperti yang terjadi pada pertengahan 1997 yaitu exchange over yang diikuti dengan perpindahan modal (capital movement).

Permasalahan lainnya adalah rendahnya kualitas proyek yang sudah dibangun dari pendanaan utang luar negeri, dimana bangunan yang terbengkalai, terjadinya pembangunan yang tidak merata, disertai masih rendahnya kualitas sumber daya manusia termasuk pemahaman terhadap pentingnya masalah kesehatan dan kebersihan. Dengan demikian dapat dikatakan dana pembangunan yang sebagian besar ditopang oleh pinjaman luar negeri tidak optimal pemanfaatannya. Meskipun tingkat penyerapan (disbursement ratio) menunjukkan angka yang tinggi namun tidak selalu mencerminkan kualitas proyek yang sudah dibangun

Ukuran efektifitas lainnya yaitu *progress variant*. Dengan semakin kompleknya masalah yang dihadapi setelah krisis, otomatis semakin banyak proyek yang progress variannya negatif cukup besar. Hal itu menyebabkan beban pada kewajiban *commitment fee* dari sejumlah dana yang belum/tidak diserap (*undisbursed balance*). Sejak krisis jumlah proyek yang telah menjadi *commitment* dalam CGI tidak banyak yang dapat direalisasikan. Kecilnya realisasi terhadap *commitment* proyek baru berkaitan dengan persyaratan yang diajukan oleh donor semakin ketat, dimana besar kecilnya *commitment* lembaga donor tergantung keberhasilan Indonesia dalam memenuhi persyaratan. Persyaratan yang cukup menonjol adalah penyusunan on lending policy dan pelaksanaan *fiduciary control* yang pada intinya adalah perbaikan proses pengadaan barang dan jasa (*procurement process*) yang lebih transparan.

Penyelesaian utang pemerintah telah dilakukan melalui forum Paris Club I, II, III, dan London Club. Beberapa kalangan berpendapat bahwa penyelesaian masalah utang pemerintah melalui Paris Club hanya merupakan solusi jangka pendek atau mengurangi defisit anggaran pemerintah jangka pendek. Beberapa kalangan termasuk LSM mengharapkan untuk selanjutnya perlu dijajaki peluang solusi yang lain seperti mendapatkan hair cut atau debt conversion guna mengurangi tekanan pembayaran ke depan sehingga mencapai tingkat debt service sustainable. Namun perlu dipahami bahwa keberhasilan mendapatkan rescheduling bukan persoalan yang sederhana, karena harus mengikuti ketentuan dan prinsip yang harus disetujui oleh seluruh anggota Paris Club.

Berdasarkan pengalaman yang panjang, jika pinjaman tidak direncanakan secara matang dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan, tidak dialokasikan secara tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan secara efisien, maka PLN akan menimbulkan masalah besar dan bahkan menyebabkan fiscal unsustainable. Sejalan dengan amanat GBHN 1999 bahwa Indonesia harus meningkatkan kemampuan pengelolaan dana pinjaman luar negeri dengan tujuan akhir adalah mencapai kemandirian dalam pembiayaan pembangunan.

Oleh karena itu manajemen utang luar negeri harus diperbaiki bahkan diubah untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatannya dan dikontrol sampai pada level yang aman

E. Sumber Dana Alternatif Non-Konvensional Untuk Pembiayaan Pembangunan

Selain empat sumber konvensional utama untuk pembiayaan pembangunan yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa usulan sumber dana inovatif untuk pembiayaan pembangunan. Usulan-usulan ini telah dikemukakan pula di beberapa forum internasional. Penggalan sumber dana alternatif diperlukan karena kebijakan deregulasi dan liberalisasi melalui penurunan tarif dan privatisasi telah menurunkan kemampuan sektor publik untuk memobilisasi sumberdana untuk pembiayaan pembangunan dari sumber-sumber tradisional, sementara pajak tak mampu dikenakan pada sektor-sektor baru dari efek globalisasi seperti perdagangan melalui internet. Alasan lainnya adalah bahwa selama beberapa dekade ini di pasar keuangan swasta telah terjadi inovasi secara berkala dalam memobilisasi sumberdaya keuangan untuk pembangunan yang sudah semestinya usaha serupa dapat dilakukan oleh sektor publik. Pada hakekatnya, pencarian alternatif-alternatif baru pembiayaan pembangunan sejalan dengan upaya untuk menurunkan tingkat utang luar negeri.

Setidaknya terdapat lima konsep sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yang dibahas dalam kajian ini yaitu: *Global Public Goods*, Pembangunan Berbasis Aset, Sistem Pajak Global, Arsitektur Baru Keuangan Internasional dan Bank Pembangunan Domestik. Usulan mengenai *Global Public Goods* dan Sistem Pajak Global sebagai alternatif pembiayaan pembangunan telah menjadi topik internasional dan dikemukakan di KTT Pembiayaan Pembangunan di Mexico 2002

Menguatnya wacana tentang *global public goods* sendiri umumnya dikaitkan dengan menguatnya arus globalisasi, terutama menyangkut adanya “*cross-border externalities*”. Suatu tindakan yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku baik itu pemerintah, perusahaan, asosiasi ataupun individual sekalipun, dapat menciptakan biaya atau keuntungan bagi pelaku lain tak terikat hambatan atau jarak nasional, institusional dan organisasional. Dari sinilah muncul pemikiran tentang pengenaan biaya atas *global public goods* dan perolehan dananya dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan.

Dalam perkembangan wacana mengenai *global public goods* ini, terdapat isu yang dilontarkan oleh beberapa negara maju untuk mengaitkan ODA dengan *global public goods*. Argumen yang umumnya dipakai adalah bahwa pada dasarnya baik ODA atau bantuan secara umum dan *global public goods* masing-masing memiliki dampak baik terhadap pembangunan. Namun penggabungan keduanya mungkin lebih tinggi dari jumlah dampak yang dihasilkan secara sendiri-sendiri tanpa lainnya. *Global public goods* dapat meningkatkan secara marjinal dampak dari bantuan secara berlipat.

Disinilah letak dilematisnya bagi negara berkembang. Bila terjadi pengalihan ODA ke pembiayaan *global public goods* berarti tiada tambahan sumber dana yang signifikan karena dana baru yang diperoleh hanyalah mengkompensasi pengurangan bantuan ODA. Hal lain adalah bahwa utamanya *global public goods* tidak secara dominan mendatangkan keuntungan bagi negara berkembang. Akan tetapi dapat disadari

juga tentang arti pentingnya dikembangkannya pengenaan biaya atas *global public goods*. Negara-negara donor dapat tergiur untuk lebih memfokuskan ODA pada isu-isu seperti stabilisasi perubahan iklim. Karena tidak semua negara menghargai *Pure global public goods* secara sama, penggunaan bantuan untuk mendanai barang ini dapat diinterpretasikan sebagai pengalihan bantuan. Jika jumlah bantuan terus menurun, pengalihan ini dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi negara-negara berkembang.

Tingkat kemungkinan diterapkannya *global public goods* ini relatif cukup sulit. Konsep ini kemungkinan besar akan digunakan beberapa negara donor terutama dari Eropa untuk dikaitkan dengan bantuan ODA. Pemerintah Indonesia mungkin bisa saja menjual isu ini guna mendapatkan dana tambahan untuk pembangunan. Namun diperkirakan dalam jangka pendek ini belum cukup banyak dana yang bisa diserap mengingat belum banyak negara maju pula yang mengadopsi isu ini menjadi kebijakan yang kongkrit. Meski begitu tingkat keberlanjutan dari wacana ini akan bersifat jangka panjang.

Alternatif kedua dari inovasi sumber dana untuk pembiayaan pembangunan adalah dengan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia untuk dikonversi menjadi modal. Dengan kekayaan yang melimpah, maka semestinya kekayaan ini dapat dimanfaatkan dengan melakukan konversi dan rekayasa finansial untuk menghasilkan modal. Dua konsep mengenai pembiayaan pembangunan berbasis sumber daya alam ini adalah Debt for Nature Swap (DNS) dan sekuritisasi aset. Hal yang mendasari konsep DNS bersumber dari pengertian global bahwa upaya-upaya internasional untuk melestarikan sumberdaya alam mesti dilanjutkan dan negara-negara maju semestinya memiliki tanggung jawab untuk membantu negara-negara yang memiliki kesulitan ekonomi tersebut diantaranya melalui fasilitas swap.

Namun untuk kasus utang luar negeri pemerintah Indonesia, pada saat ini baru utang-utang luar negeri bilateral yang dapat dijadikan *debt swap*, dan sejauh ini utang-utang multilateral (Bank Dunia, ADB, IMF) belum dapat dikonversi ke dalam mekanisme *debt swap*. Skema DNS ini sangat mungkin diterapkan tetapi tidaklah mudah dalam realisasinya karena mensyaratkan beberapa kondisi. Proyek yang didanai haruslah sebuah proyek baru, dan beberapa hambatan lain diantaranya sumber dana domestik, kemampuan penyerapan proyek pelestarian, biaya transaksi dan kesulitan riil pelaksanaannya.

Konsep kedua sekuritisasi aset bisa jadi merupakan suatu terobosan yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut untuk menutup investasi swasta yang selama ini telah dibiayai dengan pinjaman luar negeri berjangka pendek yang saat krisis menimbulkan ketidak stabilan dalam neraca pembayaran dan mata uang. Setidaknya terdapat tiga mekanisme utama dalam pembiayaan aset yaitu Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBSs) dan Real Estate Investment Trust (REITs). Sistem sekuritisasi aset perlu dijajagi dan dikaji lebih lanjut oleh pemerintah guna untuk dikembangkan di Indonesia sekaligus mendukung sektor swasta.

Alternatif ketiga dari sumber dana untuk pembiayaan pembangunan adalah konsep pajak global. Di samping usulan pembentukan organisasi pajak internasional sendiri, ada tiga usulan jenis pajak yang mungkin perlu dipertimbangkan untuk diterapkan. Jenis pertama yaitu Carbon tax memang memiliki tujuan yang baik dan mungkin pula

diterapkan di Indonesia jika kita mengabaikan aspek dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Perlu pengkajian lebih lanjut dampak pengenaan Carbon Tax terhadap perekonomian Indonesia. Jika diterapkan di negara maju yang memiliki kondisi perekonomian relatif maju mungkin sudah selayaknya, namun bagi perekonomian yang sedang tumbuh seperti Indonesia, dikhawatirkan pengenaan pajak ini akan menaikkan harga yang pada akhirnya cenderung menahan laju pertumbuhan ekonomi.

Jenis pajak kedua yaitu pajak mata uang asing yang bertujuan untuk mengurangi spekulasi, sangat mungkin diterapkan di Indonesia namun mendapatkan tentangan dari lembaga-lembaga internasional seperti IMF sehingga saat ini masih relatif sulit untuk diterapkan. Jenis pajak ketiga yaitu pajak transportasi udara internasional memiliki tingkat kemungkinan penerapan menengah, dimana besarnya peroleh dana diperkirakan pada level menengah dan tingkat keberlanjutannya bersifat jangka panjang.

Alternatif keempat berkaitan dengan ide perlunya arsitektur baru lembaga keuangan internasional. Sistem keuangan internasional yang ada saat ini dirasa tidak mampu melindungi dunia perekonomian dunia dari krisis keuangan. Dalam rangka mencegah krisis menjadi lebih dalam keterpurukannya di kemudian hari, diperlukan suatu reformasi dalam sistem atau arsitektur baru keuangan dunia. Dua konsep yang muncul adalah perlunya pengalokasian baru Special Drawing Rights dan secara regional perlu dibentuknya Asian Monetary Fund. Pengalokasian kembali Special Drawing Rights (SDRs) dapat digunakan untuk pembiayaan salah satu elemen dari *Global Public Goods* yaitu stabilitas keuangan. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa penerbitan alokasi baru SDRs telah disetujui di tahun 1997 dan diratifikasi oleh 73% dari anggota IMF namun belum memenuhi syarat karena beberapa negara termasuk Amerika Serikat belum menyetujuinya. Karena itu bisa dibayangkan bahwa ini menyangkut isu internasional sehingga harapan diterapkannya juga tergantung pada kemauan negara-negara lain.

Hampir senada dengan alokasi SDRs, usulan AMF dalam perjalanannya mengalami banyak hambatan terutama dari Amerika Serikat dan IMF yang kurang berkenan atas usulan ini. Usulan ini kemudian melunak menjadi penyusunan sistem *currency swap* dari ASEAN+3 yaitu ASEAN ditambah Jepang, Korea Selatan dan China yang dikemukakan dalam pertemuan ADB di Chiangmai pada bulan Mei 2000.

Alternatif kelima dari inovasi sumber dana untuk pembiayaan pembangunan menyangkut kelembagaan yaitu usulan dibentuknya bank pembangunan domestik. Konsepnya adalah bahwa dibutuhkan suatu lembaga keuangan yang dimiliki atau didukung oleh pemerintah guna mendukung kebijakan-kebijakan dan strategi perekonomian nasional serta membiayai proyek-proyek nasional yang tidak dapat didanai oleh swasta. Istilah yang mungkin bisa digunakan adalah *policy based finance*. Sejauh ini, pemerintah Indonesia lebih mengandalkan kepada lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia ADB, serta lembaga keuangan sejenis lainnya. Masalah utama yang mengemuka adalah sumber dananya. Bercermin pada lembaga-lembaga sejenis lain di Korea, Jepang dan China, mereka dapat menerbitkan obligasi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Diharapkan dengan menggunakan mekanisme kelembagaan pembiayaan pembangunan seperti ini, efektifitas proyek-proyek dan manajemen utang dapat ditingkatkan menjadi lebih baik. Meskipun berada pada tingkat nasional, tingkat penerapannya tidak berarti mudah. Hal yang harus dipertimbangkan

pula adalah bagaimana tanggapan dari beberapa lembaga keuangan baik regional seperti ADB maupun internasional seperti Bank Dunia.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep alternatif inovasi sumber daya untuk pembiayaan pembangunan cukup mungkin diterapkan di Indonesia namun memiliki tingkat kesulitan karena dikelilingi beberapa faktor permasalahan domestik maupun internasional yang tak bisa dilepaskan. Begitu juga aspek-aspek non ekonomis yang melingkupinya termasuk aspek politik internasional.

Kesimpulan

Beberapa hal yang bisa disimpulkan dari studi mengenai pengembangan sumber dana alternatif untuk pembiayaan pembangunan ini adalah bahwa terdapat empat sumber konvensional utama untuk pembiayaan pembangunan. Selain itu terdapat beberapa sumber inovatif sebagai pelengkap dan alternatif dari empat sumber utama konvensional tersebut seperti wacana *global public goods*, sistem pajak global dan sumber dana pembangunan berbasis aset.

Empat sumber konvensional untuk pembiayaan pembangunan tersebut adalah sumber-sumber domestik untuk pembiayaan pembangunan yang secara garis besar dikategorikan bersumber dari pajak dan non pajak. Sumber kedua adalah investasi asing baik yang berupa penanaman modal asing langsung maupun arus masuk modal swasta lainnya. Sumber ketiga adalah perdagangan internasional yang bisa diarahkan sebagai motor dari pembangunan. Sumber keempat adalah utang dan bantuan luar negeri.

Kajian mengenai sumber-sumber domestik untuk pembiayaan pembangunan menunjukkan bahwa ketersediaan dan mobilisasi sumber-sumber dana domestik, merupakan prasyarat bagi pembentukan modal riil dan, pada gilirannya, pembangunan nasional. Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika sumber-sumber dimobilisasi dan ditransformasikan secara efisien menjadi kegiatan produktif. Penciptaan sumber-sumber domestik untuk menabung dan menanamkan modal secara produktif merupakan landasan utama pembangunan yang berkelanjutan.

Sumber kedua untuk pembiayaan pembangunan yaitu investasi asing. Pembahasan lebih fokus pada penanaman modal asing sebagai salah satu komponen aliran modal yang masuk ke suatu negara menunjukkan bahwa penanaman modal asing merupakan aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai resiko yang kecil dibandingkan aliran modal lainnya, misalnya portofolio investasi ataupun utang luar negeri. Salah satu sebabnya adalah dikarenakan PMA tidak begitu mudah terkena gejolak fluktuasi mata uang (seperti halnya investasi portofolio) ataupun beban bunga yang berat (misalnya utang luar negeri).

Sumber ketiga dari sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yaitu perdagangan internasional dimana perdagangan internasional sendiri diharapkan dapat menjadi mesin dari pertumbuhan ekonomi. Guna mengembangkan perdagangan internasional, setidaknya diperlukan dua hal yaitu penciptaan persaingan sehat di dalam negeri untuk meningkatkan daya saing serta peningkatan akses pasar perdagangan internasional.

Sumber keempat dari sumber dana pembiayaan pembangunan yaitu utang dan bantuan luar negeri. Berdasarkan pengalaman yang panjang, jika pinjaman tidak direncanakan secara matang dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan, tidak dialokasikan secara tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan secara efisien, maka utang luar negeri akan dapat menimbulkan masalah besar dan bahkan menyebabkan *fiscal unsustainable*. Sejalan dengan amanat GBHN 1999 bahwa Indonesia harus meningkatkan kemampuan pengelolaan dana pinjaman luar negeri dengan tujuan akhir adalah mencapai kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu manajemen utang luar negeri harus diperbaiki bahkan diubah untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatannya dan dikontrol sampai pada level yang aman.

Selain empat sumber konvensional utama untuk pembiayaan pembangunan tersebut di atas, terdapat beberapa usulan sumber dana inovatif untuk pembiayaan pembangunan. Setidaknya terdapat lima konsep sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yang dibahas dalam kajian ini yaitu: *Global Public Goods*, Pembangunan Berbasis Aset, Sistem Pajak Global, Arsitektur Baru Keuangan Internasional dan Bank Pembangunan Domestik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep alternatif inovasi sumber daya untuk pembiayaan pembangunan cukup mungkin diterapkan di Indonesia namun memiliki tingkat kesulitan yang berbeda karena dikelilingi beberapa faktor permasalahan domestik maupun internasional yang tak bisa dilepaskan. Begitu juga aspek-aspek non ekonomis yang melingkupinya termasuk aspek politik internasional.

Rekomendasi Kebijakan

Dari hasil kajian menyeluruh terhadap empat sumber konvensional utama sumber dana pembiayaan pembangunan serta pengkajian atas beberapa sumber dana alternatif non konvensional, secara umum terdapat beberapa saran kebijakan yaitu:

- 1) Pemerintah perlu melaksanakan kebijakan makro ekonomi yang kondusif untuk mendukung terciptanya sumber dana domestik dan pengalokasiannya secara efektif.
- 2) Perlunya terus dilakukan disiplin fiskal secara kesinambungan sebagai upaya untuk penguatan sektor keuangan negara
- 3) Penguatan sektor keuangan domestik dengan mendorong berkembangnya pasar uang dan pasar modal yang baik melalui sistem perbankan yang sehat dan pengaturan kelembagaan lain yang ditujukan kepada kebutuhan pembiayaan pembangunan, termasuk non-perbankan, yang mendorong dan menyalurkan tabungan serta membantu perkembangan investasi produktif.
- 4) Peningkatan peran institusi untuk mendorong PMA. Pemerintah perlu mempunyai komitmen untuk menstimulasi masuknya aliran PMA. Juga peran dari institusi lain seperti LSM Institusi untuk menghubungkan antara PMA dengan lingkungan; kemiskinan dan ketidakmerataan. Peningkatan peran perusahaan PMA untuk transfer teknologi dan peran lain seperti serikat pekerja

dan otoritas lokal untuk mengarahkan PMA menjadi investasi yang produktif bagi pembangunan.

- 5) Keseluruhan institusi-institusi tersebut secara bersama-sama dapat mendukung upaya untuk memaksimalkan keuntungan dari PMA (misalnya kesempatan kerja; kenaikan pendapatan; transfer teknologi; stabilitas ekonomi); dan meminimalkan dampak negatif PMA (misalnya monopoli TNCs, dampak negatif terhadap sosial dan ekonomi; degradasi terhadap lingkungan).
- 6) Pemerintah dan swasta perlu terus mengupayakan peningkatan akses pasar internasional terutama dalam sistem perdagangan global saat ini melalui negosiasi yang efektif didukung pemahaman hukum internasional seperti penggunaan *lawyer-lawyer* yang mewakili Indonesia di forum seperti WTO
- 7) Peningkatan diversifikasi produk secara horizontal, dengan cara menggali berbagai jenis produk baru, dan secara vertikal dengan cara menciptakan produk baru dari bahan baku yang ada.
- 8) Peningkatan daya saing ekspor dilakukan tidak hanya dalam kegiatan usaha ekspor itu, tetapi pada setiap mata rantai dan seluruh mata rantai kegiatan usaha dari produksi barang sampai pada taraf penyampaian barang tersebut kepada tangan konsumen di luar negeri, demikian pula kualitas manusia yang terlibat di dalamnya juga harus baik.
- 9) Meningkatkan manajemen pengelolaan pinjaman luar negeri dengan memperbaiki sistem institusi dan sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan kemampuan penyerapan dana
- 10) Mengoptimalkan upaya pengurangan pembayaran utang luar negeri melalui mekanisme konversi utang (*debt conversion*) atau *Debt Swap*.
- 11) Meningkatkan perhatian terhadap masukan dana hibah yang selama ini dianggap jumlahnya tidak sebesar proyek, sehingga terabaikan peranannya.
- 12) Meningkatkan *local content* baik dari segi penyediaan barang produk dalam negeri maupun penggunaan para ahli dari dalam negeri.
- 13) Perlu terus dijajagi kemungkinan penerapan alternatif sumber dana non konvensional untuk pembiayaan pembangunan dengan kajian-kajian yang lebih mendalam untuk setiap konsepnya.
- 14) Sistem sekuritisasi aset perlu dijajagi dan dikaji lebih lanjut oleh pemerintah guna dikembangkan di Indonesia sekaligus mendukung sektor swasta
- 15) Mendukung usaha-usaha penciptaan arsitektur baru lembaga keuangan internasional
- 16) Perlunya penciptaan kelembagaan pembiayaan pembangunan yang baik sekaligus mengarahkan dan mendukung kebijakan strategis pemerintah melalui *policy based finance*

Daftar Pustaka

- Biro Pusat Statistik, *Indikator Ekonomi*, beberapa edisi
- Botchwey, Kwesi, 'Financing for Development: Current Trends and Issues for the Future', paper presented at the High-level Round Table on Trade and Development: Directions for the Twenty-first Century, Bangkok: UNTAD, 2000
- Bramble, B, *Financial Resources for the Transition to Sustainable Development*. Earth Summit 2002: A New Deal. Earth Scan Publication, 2000
- ICSW, *Financing for Development: Proposals for Action*, International Council on Social Welfare, 2002
- IFAD, *Financing Development: The Rural Dimension*, International Fund for Agricultural Development, 2002
- Inge Kaul, Katell Le Goulven and Mirjam Schnupf (editor), *Global Public Goods Financing: New Tools for New Challenges: A Policy Dialogue*, United Nations Development Program (UNDP), New York, 2002
- Islam, Azizul, 'Issues in Tax Reforms', paper presented at the Seminar on Monetary and Fiscal Policy and Poverty and Public Policy, Bangalore:UN-ESCAP, 2000
- Jun, K.W. & Brewer , T.L., *The Role of Foreign Private Capital Flows in Sustainable Development. Finance for Sustainable Development: The Road Ahead*, Proceedings of the Fourth Group Meeting on Financial Issues agenda, 1997
- Kemal, A.R., 'Notes on the Issues in Financing Economic Development', paper presented at the High-level Regional Consultative Meeting on Financing for Development Asia Pacific Region, Jakarta, 2000
- Kompas, *Kesulitan Aset Menjadi Modal*, 8 April 2002
- Kompas, *Investasi pada REITs*, 5 Mei 2002
- Paul, James A., Wahlberg, Katarina, *Global Taxes for Global Priorities*, Global Policy Forum, WEED and the Heinrich Boll Foundation, 2002
- Reside, Renato, *Mortgage Backed Securities Market in Asia*, ADB, 2000
- Republique Francaise, Ministry of Foreign Affairs & Ministry of the Economy, Finance and Industry, *Global Public Goods*, 2002
- Sagasti, Fransisco, Keith Bezanson, *Financing and Providing Global Public Goods: Expectations and Prospects*, Ministry of Foreign affairs, Sweden, 2001
- Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta 1997
- Suparmoko, M., *Keuangan Negara: dalam Teori dan Praktek*, BPFY Yogyakarta, 1991.
- Tulus Tambunan, *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran, Teori dan Temuan Empiris*, LP3ES Jakarta, 2000
- UNCTAD, *Foreign Direct Investment and the Challenge of Development*, World Investment Report 1999.

United Nations, *Financing for Development: A Critical Global Collaboration*, New York, 2002

United Nations, *Strengthening Financing for Development: Proposals From The Private Sector*, UN-Sanctioned Business Interlocutors, 2002

United Nations, *Technical report of the high-level panel on financing for development*, 2001

World Bank, *Global Development Finance: Financing The Poorest Countries*, Washington, 2002

World Bank, *Perspectives on Development*, Washington, 2001

World Bank, *World Development Report*, Washington 2001